

Kritik Postmodernisme Terhadap Etika Modern

Kosmas Sobon¹, Timoteus Ata Leu Ehaq²

¹Universitas Katolik De La Salle Manado, Indonesia

²Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng Minahasa, Indonesia

Email: ksobon@unikadelasalle.ac.id¹, timo.mscindo2018@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis aliran etika modern dan beberapa ciri khas etika modern serta beberapa kritik postmodernisme terhadap etika modern. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode hermeneutika dengan membuat interpretasi dan pemahaman yang mendalam pada dua konsep utama yakni etika modern dan postmodern dalam perspektif filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ciri khas dari etika modern yakni rasionalitas moral, universalitas moral, dan kemutlakan peraturan moral. Konsep etika modern tersebut dikritisi oleh postmodernisme dengan bertitik tolak pada pandangan etika postmodern. Dalam perspektif postmodernisme, etika secara moral manusia bersifat ambivalen, secara inheren fenomena moral bercorak "non-rasional, secara tak terhindarkan moralitas bercorak aporetik, norma dan praktik moral tidak dapat dimutlakan dan diuniversalisasikan dan moral adalah realitas pertama dari subjek manusia.

Kata kunci: etika modern; postmodernisme; utilitarisme; deontology.

Abstract

The purpose of this research is to analyze on modern ethics, some of the characteristics of modern ethics and some postmodernism criticisms of modern ethics. The method used is library research using hermeneutics by making deep interpretations and understanding of the two main concepts of modern and postmodern ethics in a philosophical perspective. The results show that the characteristics of modern ethics are moral rationality, moral universality, and the absoluteness of moral rules. The concept of modern ethics is criticized by postmodernism by starting with the postmodern ethical view. In the perspective of postmodernism, morally human ethics is ambivalent, inherently moral phenomena are "non-rational, unavoidable from aporetic morality, moral norms and practices cannot be absolute and universalized and morality is the first reality of the human subject.

Keywords: modern ethics; postmodernism; utilitarianism; deontology.

1. Pendahuluan

Apa perbedaan substansial antara modernisme dan postmodernisme? Jawaban terhadap pertanyaan ini menentukan jawaban atas pertanyaan "Apa itu postmodernisme?" Hal ini berarti bahwa modernisme dan postmodernisme sangat berhubungan. Sehubungan dengan hal itu, Todd Gitlin mengatakan, "Modernisme merobek kesatuan dan postmodernisme menikmati sobekan-sobekan" (O'Donnell, 2009). Dengan kata lain, postmodernisme tanpa modernisme adalah cacat (Suseno, 2005). Untuk memahami lebih jelas konsep postmodernisme, maka akan dijelaskan lebih dulu konsep modernisme.

Dalam bukunya *The Cultural Contradictions of Capitalism*, Daniel Bell (Ohoitmur, 2008) menjelaskan modernisme sebagai suatu kultur yang berkembang dalam modernitas sampai muncul sebagai gerakan pada abad ke-19. Modernisme merupakan suatu bentuk budaya yang inovatif, karena itu menjadi suatu *adversary culture* yang cenderung "menyangkal setiap gaya yang mapan, pada akhirnya, dirinya sendiri". Menurut Bell, ciri utama dari modernisme adalah fenomena kultural otonom dan ini berlaku baik pada bidang ekonomi maupun bidang seni. Jadi, Daniel Bell memahami modernisme sebagai budaya atau kultur yang dominan dari modernitas sebagai suatu zaman.

Salah satu ciri utama dari modernisme adalah peranan unsur rasionalitas yang kuat. Pada zaman modern, rasionalitas diandalkan sebagai sarana untuk mencapai pengetahuan objektif melalui penelitian-penelitian ilmiah, merumuskan prinsip-prinsip moral, dan hukum universal. Akibatnya, berbagai pemikiran, penemuan dan inovasi mulai berkembang secara terbuka pada era modern. Era ini menjadi titik awal lahirnya dunia sains. Rasionalitas memainkan peranan

utama dalam peradaban manusia, sehingga unsur dogma agama (unsur kekristenan), nilai-nilai moral, dan religius perlahan-lahan dikesampingkan. Rasio menjadi alat yang diyakini mampu mencapai kesejahteraan; konsekuensinya emosi dan perasaan-perasaan mulai disingkirkan. Tentang hal ini Zygmunt Bauman menulis

rasio melawan emosi-emosi atau insting-insting binatang, ilmu pengetahuan melawan agama dan dunia gaib, kebenaran melawan prasangka, pengetahuan yang betul melawan takhayul, refleksi melawan sikap kritis, rasionalitas melawan afektivitas dan norma-norma adat kebiasaan...di atas semuanya zaman modern mendefinisikan dirinya sebagai kerajaan Akal Budi dan rasionalitas (Ohoitumur, 2008).

Dalam modernisme manusia menjadi semakin otonom dan bebas. Ia merasa bebas karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Manusia bisa mengalami kemajuan dalam sejarah apabila ia mencapai pertumbuhan rasionalitas yang tinggi. Dengan kata lain, semakin manusia bertindak menurut keputusannya yang otonom dan bebas, maka ia semakin mencapai atau sekurang-kurangnya mendekati kebahagiaan sebagai manusia.

Ciri lain manusia modern adalah kekuatan hukum. Dalam masyarakat modernisme, hukum adalah jaminan sosial dan perlindungan atas hak-hak asasi manusia. Setiap kekuasaan terikat pada norma. Itulah sebabnya, *the rule of law* memainkan peranan yang penting dalam masyarakat modern (Sugiharto dan Rachmat, 2000). Kehidupan manusia selalu dikontrol oleh peraturan yang mewajibkan. Selain itu, manusia modern sangat menghargai ego atau kepribadian. Ego dilihat sebagai agen dan sumber tindakan. Ego berpikir, memutuskan dan berbuat. Jadi, dalam manusia modern, ego adalah medan tindakan. Dalam bidang filsafat, modernisme berpusat pada Epistemologi yang bersandar pada gagasan tentang subjektivitas dan objektivitas yang murni. Tugas pokok filsafat adalah mencari fondasi segala pengetahuan (fondasionalisme), tugas pokok subjek adalah merepresentasikan kenyataan objektif (representasionalisme). Konsekuensinya, dalam modernisme ilmu-ilmu positif-empiris menjadi standar kebenaran tertinggi, dan sebaliknya nilai-nilai moral dan religius kehilangan wibawanya.

Menjelang akhir abad ke-19, cita-cita luhur modernisme mulai dipertanyakan. Unsur rasionalitas yang menjadi hal utama dari modernisme tidak lagi diterima oleh masyarakat. Rasionalitas, subjek yang otonom dan bebas dalam modernisme justru telah membawa dampak yang buruk bagi keberlangsungan hidup umat manusia—seperti perang nuklir. Ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia kehilangan martabatnya dan hasilnya dehumanisasi. Manusia menjadi korban dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam keadaan seperti ini modernisme mengalami “krisis identitas” dan membuka jalan bagi postmodernisme. Dari latar belakang itulah maka postmodernisme menjadi awal untuk berkembang dan memberikan kritik yang tajam terhadap pemikiran cita-cita luhur modernisme. Pemikiran-pemikiran era modernisme dianggap tidak memberikan pengaruh bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah; apakah karakteristik utama dari etika modern dan etika postmodern? Dan bagaimana kritik postmodernisme terhadap etika modern? Kedua pertanyaan dasar inilah yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini.

2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan metode hermeneutika. Metode hermeneutika merupakan metode filsafat untuk memahami dan menginterpretasikan makna yang terkandung dalam sebuah tulisan sehingga bisa dimengerti dengan baik. Objek utama dalam penelitian ini adalah hubungan perkembangan etika modern dan etika postmodern. Untuk menjelaskan objek penelitian ini maka peneliti mencoba merefleksikan dan menginterpretasikan bacaan dan tulisan filsafat terkait etika modern dan etika postmodern; dan membuat analisis yang tajam terkait tanggapan postmodernisme terhadap etika modern.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep Postmodernisme

“Postmodernisme” adalah suatu istilah yang sangat kontroversial (Suhigarto, 1996). Istilah ini sangat membingungkan bahkan meragukan. Masih sulit untuk merumuskan pengertian baku tentang “postmodernisme”. Di bawah ini, hendak diberikan penjelasan sekitar istilah “postmodernisme”, tidak untuk memecahkan kontroversi yang ada, melainkan sebagai usaha untuk memahami kekaburan sekitar istilah “postmodernisme”.

Secara etimologis, istilah “postmodernisme” ini diturunkan dari dua kata generik, yakni “post” dan “modern”. Secara singkat “post” berarti “sesudah” dan “modern” berarti *up to date* atau “sekarang” (O'Donnell:2009). Jadi, secara etimologis, postmodern dapat diterjemahkan dengan “sesudah sekarang” atau berada “melampaui yang sekarang ini.” Lalu, bagaimana kedudukan akhiran –isme dalam istilah postmodernisme?

Istilah “postmodernisme” membingungkan karena dalam istilah itu ada awalan “post” dan akhiran “isme”. “Post” di sini memunculkan banyak perdebatan. Bila “post” diartikan sebagai “sesudah”, “suatu perhentian” atau “akhir dari segala paradigma” modern, maka itu menjadi terlalu hitam-putih dan tidak proporsional. Begitu pun dengan akhiran “isme” dalam istilah ini masih membingungkan. Akhiran “isme” memberi kesan seolah kita berhadapan dengan sebuah aliran atau paham tertentu seperti Marxisme, Eksistensialisme, Idealisme, dan lain-lain. Tapi kenyataannya, istilah “postmodernisme” dipakai dalam segala bidang dan beragam aliran pemikiran yang tak selalu berkaitan bahkan juga bisa bertentangan (Magnis-Suseno, 2005).

Dari penjelasan di atas nyata bahwa postmodernisme muncul karena modernisme mengalami “krisis” dan kegagalan cita-cita. Pergeseran modernisme ke postmodernisme tidaklah melalui revolusi yang tiba-tiba. Titik kulminasi terjadi ketika era modernisme dianggap tidak lagi menjawab kebutuhan manusia secara utuh.

Tentang istilah “postmodernisme”, I. Bambang Sugiharto menegaskan bahwa “postmodernisme” merupakan segala bentuk sikap kritis terhadap paradigma modern baik pada tingkat reflektif-teoritis maupun praktis sosio-kultural saat ini (Sugiharto dan Rachmat, 2000). “Postmodernisme” dimengerti sebagai penolakan terhadap kediktatoran pemikiran akan konsep-konsep modern. “Postmodernisme” melawan pemikiran totaliter dan curiga terhadap prinsip-prinsip universal sebagai sarana dominasi. Donny Gahral Adian menegaskan,

postmodernisme sebagai wacana pemikiran baru menggantikan modernisme. Postmodernisme meluluhlantahkan konsep-konsep modernisme seperti adanya subjek yang sadar diri dan otonom, adanya representasi istimewa tentang dunia, dan sejarah linier. Tetapi tidak dapat dipungkiri jika postmodernisme sebagai babak baru dari berakhirnya era modern telah memengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia (Irwandi, 2010).

Postmodernisme di sini dipandang sebagai suatu keterputusan radikal dari modernisme. Postmodernisme menjadi babak baru dari berakhirnya era modern. Era modernisme yang sempat mengagungkan rasio hanyalah menjadi alat oleh manusia demi kepentingan keserakahan manusia akan kuasa. Menurut Lyotard, “epistemologi sekarang ini bukan terletak pada tujuan kebenaran, melainkan kekuasaan” (Rosali, 1991). Pengetahuan mengandung kekuasaan yang menakutkan, dan para ilmuwan atau intelektual dipandang sebagai kelompok elit dalam masyarakat. Konsekuensinya, mereka memainkan fungsi sebagai “penguasa” dalam menawarkan solusi-solusi secara otoritatif tentang kebenaran kognitif dan keputusan moral. Sebaliknya, dalam postmodernisme pengetahuan tidak lagi mengandung kekuasaan dan para ilmuwan hanya bisa menyumbangkan bentuk pengetahuan atau kebenaran interpretatif. Era para intelektual sebagai diktator rasionalistis telah berakhir. Menurut Zygmunt Bauman, kondisi postmodern mendudukan kaum intelektual lebih pada posisi sebagai interpretator dan bukan lagi sebagai legislator yang berwenang melegitimasi aturan-aturan kehidupan (Ohoitumur, 2008).

Dalam postmodernisme, martabat manusia dijunjung tinggi. Postmodernisme mengkritisi era modern yang cenderung mengatasnamakan manusia universal untuk menindas manusia. Artinya, postmodernisme dapat membuat kita peka terhadap kemungkinan bahwa wacana besar positif, prinsip-prinsip etika positif, dapat diputar dan dipakai untuk menindas manusia. Martabat manusia harus dijunjung tinggi, tetapi tidak semua tindakan yang mengatasnamakan manusia betul-betul menghormati martabat manusia. Begitu pula kebebasan adalah nilai tertinggi, tapi bisa saja terjadi atas nama kebebasan, orang lain ditiadakan (Magnis-Suseno, 2005).

b. Postmodernisme dalam Perspektif Filosofis

Dalam bidang filsafat, istilah postmodernisme diperkenalkan secara sistematis oleh Jean Francois Lyotard dalam bukunya yang berjudul *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge* (Lyotard:1986). Buku ini dianggap sebagai karya yang secara definitif menempatkan postmodernisme dalam agenda diskusi para intelektual Eropa. Bukunya ini menjadi *locus classicus* untuk diskusi-diskusi tentang postmodernisme pada bidang filsafat.

Karya Lyotard itu menjelaskan kondisi perubahan pengetahuan dalam masyarakat yang disebutnya “the most highly developed societies”. Ia menulis bahwa istilah “postmodern” yang

dipakainya untuk “menyatakan keadaan kebudayaan kita menurut transformasi-transformasi yang sejak akhir abad 19 telah mengubah aturan permainan dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Inti transformasi itu terletak pada caranya bentuk-bentuk pengetahuan dilegitimasi (Ohoitumur, 2008). Ilmu pengetahuan dilegitimasi melalui apa yang disebutnya “narasi besar” (*the grand narrative atau metanarrative*). Menurut Lyotard, karakteristik yang paling fundamental dari ilmu pengetahuan modern adalah,

melegitimasi dirinya sendiri dengan merujuk kepada suatu metadiskurs... yang secara eksplisit dibantu oleh beberapa ceritera agung (*grand narrative*) seperti dialektika Roh Absolut, hermeneutika tentang makna, emansipasi subjek rasional atau subjek pekerja atau tercapainya kesejahteraan hidup (Ohoitumur, 2008).

Berdasarkan perspektif ini postmodernisme diartikan sebagai ketidakpercayaan terhadap segala bentuk narasi besar; penolakan filsafat metafisis, filsafat sejarah dan segala bentuk pemikiran yang totalitas (Hegelianisme, Liberalisme, Marxisme, atau apa pun). Lyotard membawa istilah postmodernisme ke dalam medan diskusi filsafat yang lebih luas. Inti pemikirannya umumnya berkisar tentang posisi pengetahuan pada masa modern khususnya cara ilmu dilegitimasi oleh narasi besar atau metanarasi (Sugiharto, 1996). Jadi, dalam bidang filsafat istilah postmodernisme menunjuk pada segala bentuk refleksi kritis atas paradigma-paradigma modern dan atas metafisika pada umumnya.

Lyotard merumuskan kondisi pengetahuan postmodern sebagai “ketidakpercayaan terhadap metanaratif”. Misalnya, Descartes mempunyai Cogito sebagai dasar legitimasi pengetahuan; Spinoza menemukan prinsip monistis Deus sive natura; Leibniz percaya teguh pada monad-monad; kaum empiris (Locke, Berkeley, Hume) berpegang teguh pada persepsi dan data-data empiris; Hegel dan para idealis tergantung pada dialektika Roh atau Subjek Absolut, dan seterusnya. Semuanya itu boleh disebut sebagai “*grand narrative*” tersendiri. Cerita-cerita agung itu kalau dikisahkan maka dengan sendiri akan melegitimasi isi cerita (informasi, pengetahuan). Benar bahwa sasaran dari semuanya itu adalah kebahagiaan manusia, emansipasi harkat manusia ke tingkat kealtas yang lebih menyejahterakan, namun dalam konteks perubahan sosio-kultural dan ekonomi bersama pesatnya perkembangan informasi dan komunikasi, legitimasi pengetahuan yang merujuk pada metanarratives menjadi problematis (Ohoitumur, 2008).

Lyotard menyebut tiga faktor penentu dalam perubahan status pengetahuan (Ohoitumur, 2008). Pertama, sejak akhir Perang Dunia ke-2, ilmu pengetahuan dan teknologi postindustrial mengalami perkembangan pesat. Perkembangan itu menyebabkan pergeseran tekanan jauh dari pertanyaan-pertanyaan tentang nilai intrinsik bentuk-bentuk pengetahuan dan tentang tujuan tingkah laku manusia, kepada promosi pengetahuan hanya sebagai suatu sarana yang secara optimis dapat meningkatkan efisiensi pekerjaan dari pelbagai sistem. Kedua, bangkitnya generasi baru kaum kapitalis yang dalam cara memproduksi “telah mematikan alternatif komunis dan memenuhi kenikmatan individual terhadap barang-barang dan pelayanan”. Ketiga, “benih-benih delegitimasi dan nihilisme yang tak terlepas dari *grand narratives* abad ke-19”. Ruang transformasi pengetahuan menjadi lebih luas, karena adanya inisiatif dan arah baru pada penelitian-penelitian ilmiah. Arus informasi yang padat dan lancar lewat sarana-sarana komunikasi yang serba komputeral, meruntuhkan dasar legitimasi tunggal pengetahuan.

Lyotard tidak menuduh situasi rasionalitas yang anarkis, juga tidak melawan rasionalitas perse, dan mendefinisikan para ilmuwan sebagai diktator rasionalistis, melainkan Ia menunjukkan bahwa kondisi postmodern tidak lagi bisa menerima ide totalitas rasional yang memberikan legitimasi tunggal bagi pengetahuan. Artinya, Ia menegaskan akan adanya pluralitas atau kemajemukan bentuk rasionalitas (bidang teoritis, praktis, sosial, politik, dan etika). Dengan begitu, postmodernisme dimengerti sebagai “perlawanan” (*resistance*) yang berusaha bukan untuk mendobrak dan menggantikan norma-norma kultural yang mapan dengan yang baru, melainkan untuk “mempertanyakan”, “menguji” dan “menyelidiki” terus menerus realitas kehidupan.

c. Kritik Postmodernisme terhadap Etika Modern

Uraian tentang postmodernisme di atas telah memperlihatkan bahwa postmodernisme ternyata menjadi pokok diskusi pada berbagai bidang termasuk bidang etika. Oleh karena itu muncul pertanyaan, apakah artinya etika dalam perspektif postmodernisme? Kata etika yang dipakai di sini dalam arti sempit, yakni sebagai cabang filsafat yang secara kritis mempertanyakan dan menyelidiki dasar-dasar moralitas yang berlaku. Sebelum menjawab pertanyaan ini baiklah

dideskripsikan “etika modern”, karena pada dasarnya etika postmodern muncul karena kritiknya atas etika modern.

1) Aliran Etika Modern

Untuk memahami garis besar pemikiran etika modern, maka di bawah ini hendak diuraikan aliran-aliran etika modern dan beberapa ciri pokok etika modern. Aliran-aliran etika modern adalah etika Utilitarisme dan etika deontologi Immanuel Kant. Selanjutnya, ciri-ciri etika modern; rasionalitas moral, universalitas moral, dan kemutlakan peraturan moral. Etika teleologi mendasarkan legitimasi terhadap tindakan moral atas telos, yang dalam bahasa utilitarisme, yang artinya kesenangan maksimal dan absensi rasa sakit bagi sebanyak mungkin orang. Sedangkan, etika deontologi meletakkan pembenaran moral pada kedaulatan moral atau otonomi si pelaku yang terekspresi pada kesadaran akan kewajiban.

2) Etika Utilitarisme

Utilitarisme berasal dari kata benda bahasa Latin “utilitas” (bahasa Inggrisnya: *utility*) yang berarti faedah atau kegunaan. Utilitarisme dituduh mau menyamakan kebaikan moral dengan manfaat. Utilitarisme juga dianggap sebagai “etika sukses” yakni etika yang menilai kebaikan orang dari perbuatannya yang menghasilkan sesuatu yang baik atau tidak (Magnis-Suseno, 1987). Sebagai cabang filsafat dan etika, aliran utilitarisme (utilitarianism) mulai berkembang di Inggris yang berasal dari filsuf Jeremy Bentham (1748-1832). Selanjutnya, formulasi aliran ini baru dikembangkan secara definif oleh John Stuart Mill (Ohoitumur, 2008), murid Bentham dalam bukunya *Utilitarianism* (terbit 1863). Utilitarisme dimaksudkan sebagai dasar etis untuk membarui hukum Inggris, khususnya hukum pidana. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memajukan kepentingan warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah Ilahi. Menurut kodratnya, manusia menghindari ketidakseimbangan dan mencari kesenangan. Kebahagiaan tercapai, jika manusia memiliki kesenangan dan bebas dari kesusahan.

Karena tingkah laku manusia terarah pada kebahagiaan, maka suatu perbuatan dapat dinilai baik atau buruk, sejauh dapat meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan semua orang. Moralitas suatu tindakan harus ditentukan dengan mengimbanginya untuk mencapai kebahagiaan umat manusia. Dengan pemahaman ini, Bentham sampai pada *the principle of utility* yang berbunyi: *the greatest happiness of the greatest number*, “kebahagiaan terbesar dari jumlah orang terbesar”. Prinsip kegunaan ini menjadi norma untuk tindakan-tindakan pribadi maupun untuk tindakan pemerintah (Ohoitumur, 2005).

Selanjutnya, John Stuart Mill mengembangkan teori utilitarisme dengan memberikan landasan normatif. Inti landasan normatif ialah prinsip utilitas: suatu tindakan dibenarkan hanya karena menghasilkan kebahagiaan (*happiness dan pleasure*) dan sekaligus membebaskan dari rasa sakit (*pain*). Yang menarik para utilitarisme adalah teori ini mementingkan perhitungan rasional (*calculus*) menyangkut derajat kebahagiaan dan jumlah partisipan (Ohoitumur, 2008). Utilitarisme mengungkapkan suatu penghayatan moral yang kritis dan rasional. Tidak ada pengakuan bahwa tindakan-tindakan yang ada pada dirinya sendiri wajib atau terlarang. Oleh karena itu, utilitarisme terlihat lebih rasional dari etika kewajiban Kant, karena utilitarisme tidak lagi membutuhkan paham kewajiban, sebaliknya menunjukkan manfaat dari tindakan moral. Suatu tindakan dikatakan baik secara moral apabila tindakan itu menghasilkan akibat-akibat paling baik bagi umat manusia. Akibat baik itu sesuai dengan dalil-dalil empiris, dan dapat dihitung dalam satuan nikmat empiris (Magnis-Suseno, 2005).

Maksud utama dari utilitarisme adalah manusia selalu bertindak sedemikian rupa agar kebahagiaan bisa dialami oleh sebanyak mungkin orang. Manusia harus bertindak sedemikian rupa sehingga menghasilkan akibat baik sebanyak mungkin dan sedapat-dapatnya mengelakkan akibat-akibat buruk. Dengan kata lain, ciri khas dari utilitarisme, akibat-akibat baik itu tidak hanya dilihat dari kepentingan si pelaku sendiri, melainkan dari segi kepentingan semua orang yang terkena oleh akibat tindakan si pelaku. Secara moral, manusia diharapkan bersikap baik terhadap sesama. Jadi, jika manusia melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi sesama, maka perbuatan itu dalam arti moral harus dinilai baik. Sebaliknya, suatu tindakan belum tentu baik dalam arti moral hanya karena berguna bagi diri sendiri. Misalnya, tindakan korupsi adalah tindakan tidak baik secara moral karena hanya berguna bagi si pelaku (Magnis-Suseno, 1987). Etika utilitarisme bersifat universal, karena yang menjadi norma moral bukanlah akibat-akibat baik bagi si pelaku itu sendiri saja, melainkan akibat-akibat baik bagi seluruh dunia. Utilitarisme menuntut perhatian terhadap kepentingan semua orang yang terpengaruh oleh akibat tindakan itu, termasuk kepentingan si pelaku itu sendiri.

3) Etika Deontologi Kant

Pemikiran etika deontologi Immanuel Kant (1724-1804) bertentangan dengan etika utilitarisme. Menurut Kant, suatu tindakan disebut baik secara moral bukan terletak pada manfaat bagi banyak orang dari tindakan itu, melainkan karena adanya kewajiban. Baginya, moralitas berkaitan erat dengan tugas dan kewajiban seseorang, dan tergantung pada keberadaannya sebagai pelaku bebas yang tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu (Smith dan Raeper, 2000). Seseorang baru memasuki taraf moralitas, jika dia melakukan perbuatan semata-mata karena kewajiban. Jadi, menurut Kant, suatu perbuatan bersifat moral, jika dilakukan semata-mata "karena hormat kepada hukum moral". Dengan hukum moral dimaksudkannya kewajiban. Sebaliknya, seseorang yang melakukan kewajiban moral demi suatu tujuan tertentu, termasuk demi kebahagiaan sendiri, bukan namanya moralitas, melainkan pertimbangan kebijaksanaan (Magnis-Suseno, 2005). Seseorang bersikap moral apabila ia menyadari bahwa ia berada di bawah hukum moral dan mau melaksanakan hukum moral demi hormat terhadap hukum moral itu sendiri.

Untuk memahami apa yang dimaksudnya, Kant membedakan dua macam perintah yaitu perintah kategoris (perintah tak bersyarat) dan perintah hipotesis (perintah bersyarat). Perintah hipotesis adalah perintah yang hanya berlaku apabila seseorang menghendaki apa yang menjadi syaratnya. Dengan kata lain, perintah hipotesis selalu diikutsertakan sebuah syarat. Berbeda dengan perintah kategoris yang sifatnya tak bersyarat, mutlak, atau absolut. Perintah kategoris mewajibkan begitu saja, tanpa syarat. Hal yang sudah disadari kewajiban harus bagaimana pun juga dilakukan karena kewajiban itu berlaku mutlak (Hadiwarjono, 1980). Imperatif kategoris memerintahkan tindakan tertentu secara langsung, tanpa mengarah kepada tujuan lain sebagai syarat. Imperatif itu dikatakan "kategoris", karena isinya dapat diaplikasikan secara langsung kepada semua makhluk rasional dan disebut "imperatif" karena merupakan prinsip yang atasnya kita harus bertindak. Rumusan umum dasar dari imperatif kategoris: Bertindaklah sedemikian rupa sehingga maksim tindakanmu dapat sekaligus menjadi hukum universal (Ohoitumur, 2007). Kant menetapkan imperatif kategoris sebagai prinsip universal yang berlaku secara objektif. Seseorang yang melaksanakan prinsip universal berarti ia bertindak demi kehendaknya sendiri dan itulah kewajiban (*duty*). Kant menegaskan bahwa setiap orang dituntut untuk bertindak demi kewajibannya, tanpa pertimbangan utilitaris apapun, misalnya perihal untung atau rugi. Suatu kewajiban moral berlaku entah menguntungkan atau tidak, mengenakan atau tidak, dipuji orang atau malah ditegur.

Etika deontologi Kant mewariskan beberapa ide kunci untuk etika modern: otonomi dan kebebasan, universalitas dan objektivitas prinsip-prinsip moral, rasionalitas dan kemutlakan norma moral. Oleh karena itu, bagian berikut akan diuraikan ciri-ciri khas yang ada dalam etika modern.

d. Ciri Khas Etika Modern

Dua aliran etika modern yang sudah diuraikan secara tidak langsung telah menyentuh tentang ciri pokok dalam etika modern. Di bawah ini diuraikan beberapa ciri khas etika modern yakni rasionalitas moral, universalitas moral, dan kemutlakan peraturan moral.

1) Rasionalitas Moral

Etika modern sangat menekankan rasionalitas. Rasionalitas menjadi prinsip-prinsip moral dan hukum moral yang sifatnya universal dan rasional. Dengan kata lain, moralitas itu bersifat rasional. Etika modern menjadikan rasio sebagai instrumen atau sarana/tujuan dari tindakan moral (Poole, 1993). Tindakan seseorang selalu didasarkan pada aturan moral yang telah dibuat secara rasional. Segala tindakan, sikap, anggapan, dan tuntutan harus bersifat rasional (Magnis-Suseno, 1987). Perbuatan jahat berarti perbuatan yang dilakukan tanpa pertimbangan unsur rasional. Tindakan moral manusia selalu bersumber dari ketentuan yang sifatnya rasional atau masuk akal. Cita-cita moral yang benar harus didukung oleh akal budi, karena segala keputusan berawal dari pemahaman yang rasional dan dianggap punya manfaat bagi hidup seseorang (Shomali, 2001).

Hal yang rasional (aturan) diwajibkan untuk semua orang tanpa membedakan satu dengan yang lain. Karena etika modern sangat menekankan unsur rasio, maka emosi, perasaan-perasaan, nilai-nilai moral dan religius disingkirkan. Manusia dikatakan baik dan sejati apabila ia mampu melaksanakan perbuatannya berdasarkan aturan yang rasional dan mampu mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya sendiri secara rasional. Prinsip inilah yang ada dalam etika utilitarisme. Utilitarisme sangat mementingkan perhitungan rasional (*calculus*).

Tindakan dikatakan bermoral jika dapat membawa efek yang dirasakan dan efek itu sifatnya masuk akal dan dapat diperhitungkan (Poole, 1993).

2) Universalitas Moral

Universalitas merupakan ciri utama dalam etika modern. Etika modern cenderung mengontrol dan mengendalikan agar segala sesuatu termasuk kehidupan manusia didesain dan direkayasa. Atas nama universalitas moral, nilai-nilai moral dan aturan moral dilegitimasi supaya ada keseragaman besar-besaran dalam masyarakat. Manusia modern adalah manusia yang mengakui dan menghormati martabat kemanusiaan. Karena manusia itu sederajat, maka dituntut suatu persamaan moral (Sugiharto & Rachmat, 2000).

Universalitas merupakan usaha dari modernitas untuk meng-universalisasi-kan satu kodrat atau esensi manusia. Benarlah bahwa universalitas moral yang dibuat melalui rasionalitas ilmiah, namun hal itu justru membawa intoleransi terhadap nilai-nilai lokal yang penting yang akhirnya membawa krisis. Universalitas akhirnya dicurigai bersifat ideologis. Penekanan etika yang bersifat universal bisa menimbulkan berbagai macam masalah. Universalitas melemahkan hak istimewa moral individu dan memberikan otoritas moral pada negara. Usaha-usaha universalitas moral menjadi suatu upaya menggantikan otonomi moral individu dengan peraturan rasional yang heteronom dengan dalih etis.

3) Kemutlakan Peraturan Moral

Universalitas etis yang ketat tentunya hanya memunculkan peraturan. Etika modern sangat menekankan rumus-rumus etis (peraturan). Moralitas modern bersumber pada peraturan. Menghadapi masalah-masalah moral, etika modern menegakkan dan memproduksi peraturan-peraturan normatif yang sifatnya memaksa. Para pemikir modern memandang moralitas sebagai sesuatu yang diajarkan kepada manusia (Widiyono, 2009). Manusia dikatakan baik dan bermoral apabila ia telah melaksanakan hukum dan peraturan moral yang telah disusun.

Dengan kata lain, manusia dikatakan baik secara moral apabila ia sudah melaksanakan begitu banyak peraturan yang dibuat secara rasional. Untuk itu, etika modern bercorak birokratis (Sugiharto & Rachmat, 2000). Artinya segala sesuatu termasuk perilaku manusia perlu diorganisasikan dengan mekanismenya yang logis, sistimatis dan efisien. Karena aturan punya peranan utama, maka seluruh pola perilaku manusia harus disesuaikan dengan aturan itu. Dalam masyarakat modern, hukum memainkan peranan penting. Hukum adalah jaminan sosial dan perlindungan atas-hak manusia. Jadi, perbuatan manusia adalah baik secara moral, bila perbuatan moral itu sesuai dengan aturan rasional yang ada dalam masyarakat.

e. Corak Etika Postmodern

Cita-cita etika modern ternyata tidak menghasilkan suatu tatanan moral yang baik, tapi sebaliknya membawa dampak yang buruk bagi hidup manusia. Martabat manusia bukan semakin diangkat malahan terjadi dehumanisasi. Berikut ini akan diuraikan beberapa kritik postmodernisme terhadap etika modern dengan bertitik tolak pada pandangan etika postmodern dari Zygmunt Bauman, dalam bukunya yang berjudul *Postmodern Ethics* (Bauman, 1993). Etika postmodern tidak bermaksud menghapus prinsip-prinsip moral yang telah berlaku dalam zaman modern, melainkan mengkritik keyakinan dasarnya yang selalu mengandaikan landasan mutlak dan universalitas moral.

1) Secara Moral Manusia Bersifat Ambivalen

Manusia secara moral pada hakikatnya bukan baik ataupun buruk, melainkan ambivalen, bermakna ganda. Dalam kehidupan manusia, moralitas dan norma moral sangat penting. Ketika muncul masalah moral yang saling bertentangan, peraturan-peraturan dan prinsip-prinsip etis tidak bisa memberikan jalan keluar. Upaya pembenaran tindakan-tindakan moral yang absolut membuat manusia keluar dari identitasnya yang sesungguhnya. Oleh karena itu, etika postmodern mengajak manusia untuk mengolah emosi-emosi dan dorongan natural dalam dirinya dengan tidak mengesampingkan pertimbangan rasional. Realitas hakikat manusia begitu bercampur aduk dan bermakna ganda. Unsur rasional pun tidak cukup mengartikulasikannya. "Tidak ada satu pun peraturan moral yang secara logis dan koheren dapat menerangkan kondisi moralitas yang secara esensial ambivalen itu" (Bauman, 1993). Etika postmodern mengkritisi kehidupan sosial masyarakat modern yang telah diorganisasikan dengan peraturan yang rasional. Etika modern sangat menekankan peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban moral yang telah diartikulasikan secara jelas dan masuk akal. Dengan begitu, etika modern

menganggap manusia bisa menjadi sempurna dan hidup sosial masyarakat semakin manusiawi dalam kehidupan bersama. Tapi ternyata semuanya tidak terwujud.

Etika postmodern mau mengembalikan manusia kepada realitas moral yang ambivalen, mempersatukan kembali manusia dengan dunianya, dan mengajaknya untuk bisa menghidupi ambiguitas emosi-emosi, hawa nafsu, dorongan-dorongan natural di samping pertimbangan rasional (Bauman, 1993). Konsekuensinya, di atas realitas ambivalen itulah berdiri moralitas dan norma-norma moral.

2) Secara Inheren Fenomena Moral Bercorak “non-rasional”

Etika postmodern menyatakan bahwa fenomena moral tidak teratur, tidak berulang (repetitive), tidak monoton dan tidak dapat diprediksi. Fenomena moral juga tidak dapat dirumuskan dalam suatu pedoman tertentu (rule-guided) (Bauman, 1993). Bagaimana pun tidak ada prinsip moral yang mungkin dapat menghadapi fenomena moral dalam sebuah cara yang mendalam dan lengkap. Dengan kata lain, tidak ada satu kode etik pun yang dapat menyelesaikan segala masalah etika dengan lengkap dan menyeluruh. Fenomena-fenomena moral pada hakekatnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tidak dapat diramalkan secara akurat, tak dapat diterangkan dalam skema “sarana-tujuan”, atau pun tak dapat dimengerti menurut terminologi utilitas; fenomena moral terletak dalam kawasan non-rasional. Artinya, fenomena moral tidak bisa diselesaikan dan dirumuskan secara rasional, karena masalah moral melampaui yang rasional dan peraturan-peraturan universal. Jadi, fenomena moral mendahului unsur-unsur rasional. Fenomena moral itu selalu bersifat eksistensial dan bukan berdasarkan kesadaran rasional.

Hal itu bertentangan dengan ciri etika modern yang mengklaim bahwa fenomena moral bercorak rasional. Etika modern dinilai melalaikan “kesendirian” subjek moral sebagai pangkal semua pilihan, keputusan, tindakan dan fenomena moral. Untuk itu, Bauman menulis

kita tidak bermoral karena masyarakat; kita hidup dalam masyarakat, kita *adalah* masyarakat, karena kita bermoral. Pada inti sosialitas terdapat kesendirian dari person moral. Sebelum adanya masyarakat dan pencipta-pencipta hukumnya, dan sebelum para filsuf merumuskan prinsip-prinsip etis, sudah ada manusia yaitu subjek-subjek moral tanpa hambatan dari kebaikan-kebaikan yang dikodifikasikan (Bauman, 1993).

Situasi moral subjek mendahului sosialitas. Jadi, Bauman tidak mengasalkan fenomena moral pada rasionalitas (yang memungkinkan universalisasi dan hasilnya universalisme), melainkan pada tataran ontologis (non-rasional) realitas subjek.

3) Secara Tak Terhindarkan Moralitas Bercorak Aporetik

Moralitas secara inheren penuh dengan kontradiksi yang tidak teratasi. Hal ini berarti bahwa masalah moral mengandung konflik yang tidak dapat dipecahkan (aporia) (O'Donnell, 2009). Dorongan-dorongan moral dari subjek manusia bukan satu-satunya yang menjadi dasar moral. Dorongan moral tak dapat diandalkan sebagai landasan bangunan moralitas yang stabil dan penting. Kaum modernis telah menetapkan moralitas sebagai sikap pelaku moral yang otonom, bebas, dan rasional. Tindakan moral menjadi keputusan subjek. Karena bukan hal itu yang menjadi dasar moral, maka Bauman menunjuk pada realitas ontologis subjek moral yang ambivalen.

Postmodernisme mengkritik etika modern yang menawarkan kesejahteraan umum dengan akal budi dan rasionalitas sebagai dasar. Bauman melihat bahwa dasarnya adalah dorongan moral itu sendiri. Dasar moralitas tersebut bercorak ambivalen. “Subjek moral bergerak, merasa, dan bertindak dalam konteks ambivalen dan ia dikejar dalam ketidak-pastian” (Bauman, 1993). Ambivalensi tidak saja berarti adanya kecenderungan-kecenderungan kodrati yang bertentangan dengan rasio manusia, melainkan juga wajah ganda dari dorongan moral. Jadi, aporia kodrat manusia sendiri tidak dapat dinilai sebagai baik atau buruk melainkan ambivalen.

4) Norma dan Praktek Moral Tidak Dapat Dimutlakan dan Diuniversalisasikan

Dalam postmodernisme tidak ada sesuatu atau satu pun yang merupakan sebuah moralitas yang berlaku secara universal. Ide dasarnya adalah moralitas tidak-dapat-diuniversalisasikan. Baik norma-norma etis maupun praktek-praktek moral tidak mengekspresikan kemutlakan (yang diuniversalisasikan, melainkan hanya relativitas). Postmodernisme mengkritik bentuk kongkrit universalisme dan kemutlakan norma dan praktek moral dalam etika modern. Fenomena moral (nilai, keyakinan, pandangan dan praktek) dalam

etika modern selalu diawasi. Fakta ini melecehkan heteronomi dan memaksakan moralitas dari luar sehingga mematikan tanggung jawab subjek secara otonom.

Etika postmodern melindungi pelaku-pelaku moral dan moralitas seperti otonomi, kebebasan, tanggung jawab dan kapasitas moral masing-masing pihak dari ancaman universalisme yang menghancurkan. Prinsip, norma, peraturan, dan praktek moral berdiri di atas landasan eksistensi manusia yang ambivalen. Karena itu landasan ini sama sekali tidak pasti, bersifat elusif, dan tidak dapat diuniversalisasikan secara mutlak. Dengan kata lain, etika postmodern mau memperlihatkan relativitas norma-norma etis dan praktek moral. Jadi, ada relativitas, tapi bukan relativisme (Ohoitmur, 2008).

5) Moral adalah Realitas Pertama dari Subjek Manusia

Postmodernisme menolak sistem etika yang memaksa yang keluar dari masyarakat sebagai sesuatu yang universal. Etika semestinya menjadi sebuah sistem yang memancar dari sang individu (Bauman, 1993). Penegasan ini berdasar pada asumsi bahwa *being for the Other* mendahului *being with the Other*. Hal ini bertentangan dengan etika modern yang menegaskan bahwa orang hanya berhenti pada rasa aman dan kepuasan karena ia telah melaksanakan hukum dan peraturan dan sebaliknya tidak melangkah terus untuk mencapai responsibilitas yang diam dalam kedalaman subjek. Etika postmodern justru menegaskan bahwa moralitas tidak terletak pada tataran kesadaran rasional melainkan pada dasar ontologis subjek moral. Jadi, menurut etika postmodern, tanggung jawab bukan terletak pada lapisan kesadaran rasional, melainkan pada tataran ontologis. Dari perspektif pokok ke lima inilah etika tanggung jawab Levinas menjadi rujukan penting dalam etika postmodern.

4. Simpulan dan Saran

Perkembangan etika postmodern mempunyai kedudukan penting dalam etika modern. Pemikiran etika modern memberikan angin segar bagi cita-cita etika postmodern. Dengan kata lain, etika postmodern sendiri lahir karena adanya reaksi kritis atas etika modern yang sangat mengagungkan rasionalitas, universalitas, dan kemutlakan peraturan moral. Cita-cita etika modern ini ternyata membawa dampak buruk bagi kehidupan manusia. Martabat manusia bukan semakin ditegakkan melainkan terjadi dehumanisasi. Dalam keadaan seperti ini etika modern mengalami "krisis identitas" yang pada akhirnya postmodernisme mengkritisnya. Postmodernisme tidak bermaksud menghapus prinsip-prinsip moral yang telah berlaku dalam zaman modern, melainkan mengkritik keyakinan dasarnya yang selalu mengandaikan landasan mutlak dan universalitas moral.

Salah satu masalah moral yang dikritisi oleh etika postmodern terhadap etika modern adalah masalah tanggung jawab. Dalam etika modern, orang dikatakan bertanggung jawab secara moral apabila dia telah melaksanakan peraturan-peraturan moral universal yang disusun secara rasional dan sistematis. Sebaliknya, postmodernisme menyatakan bahwa etika tanggung jawab melampaui segala peraturan moral, bersifat asimetris, dan tanggung jawab selalu terarah kepada orang lain (*being for the others*).

5. Daftar Pustaka

- Bauman, Zygmunt. 1993. *Postmodern Ethics*. Oxford: Basil Blackwell.
- Irwandi. 2010. "Postmodernisme Menuju Pluralisme Agama," diambil dari: <http://irgip.multiply.com/journal/item/6/Postmodernisme-Menuju-Pluralisme-Agama> (10 Februari 2021).
- Lyotard, Jean-Francois. 1986. *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, translated by Geoffrey Bennington and Brian Massumi. Manchester: Manchester University Press.
- Magnis-Suseno. 1987. Franz. *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magnis-Suseno. 2005. *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- O'Donnell, Kevin. 2009. *Postmodernisme*, terj. Jan Riberu. Yogyakarta: Kanisius.
- Ohoitmur, Johanis. 2005. "Etika Umum: Pengantar Tema-tema Dasar Filsafat Moral" dalam *Traktat Kuliah STF Seminari Pineleng*.

- Ohoitmur, Johanis. 2007. "Sejarah Filsafat Barat Modern" dalam *Traktat Kuliah STF Seminari Pineleng*.
- Ohoitmur, Johanis. 2008. "Aliran-Aliran Utama Filsafat Barat Kontemporer" dalam *Traktat Kuliah STF Seminari Pineleng*.
- Poole, Ross. 1993. *Moralitas dan Modernitas*, terj. F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius.
- Shomali, Mohammad A. 2001. *Relativisme Etika*, terj. Zaimul Am. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi.
- Rosali, Sudjana. 1991. "Kemanusiaan dalam Perspektif Postmodern," dalam *Jurnal Filsafat: Postmodernisme* Vol. 1 No. 1, Jakarta: Lembaga Studi Filsafat & *Institute for Philosophy and The Future of Humanity*.
- Smith, Linda dan William Raeper. 2000. *Ide-ide: Filsafat dan Agama, Dulu dan Sekarang*, terj. P. Hardono Hadi. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwijono, Harun. 1980. *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiharto, I. Bambang. 1996. *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiharto, I. Bambang., Agus Rachmat W. 2000. *Wajah Baru, Etika & Agama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Widiyono, A. Nugroho. 2021. "Pandangan Zygmunt Bauman tentang Etika Postmodern" diambil dari: <http://filsafatkita.f2g.net>, (15 September 2021).